

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA (PTA) BANDAR LAMPUNG NOMOR 0019/Pdt.G/2021/Pta.Bdl TENTANG HAK HADHANAH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ JATUH KEPADA AYAH PASCA PERCERAIAN

Oleh

INTAN MALIDA RAHMA

Berbagai permasalahan akan muncul akibat dari suatu perceraian. Salah satunya adalah hak *hadhanah* atau hak pengasuhan anak. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami-istri, membawa konsekuensi berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu, baik hak yang menjadi kebutuhan material anak, seperti sandang, pangan dan papan, maupun hak immateril anak, seperti hak beribadah, hak mendapatkan perhatian dan kasih sayang sekaligus hak berinteraksi sosial. Salah satu hak anak yang sangat penting untuk dipenuhi orang tuanya adalah hak nafkah (alimentasi).

Perkara ini merupakan perkara hak asuh anak. Dalam perkara ini yang menjadi persoalan pengasuhan anak ialah seorang anak perempuan yang pada putusan pertama hak asuhnya jatuh kepada pengugat selaku ibu kandungnya. Ketika putusan ini di jatuhkan anak tersebut berumur enam tahun. Dalam putusan banding, hakim memberikan hak asuh anak tersebut kepada Pembanding sebagai ayah kandung dari si anak. Sementara itu dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) dinyatakan bahwa, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) juga dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *Mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0019/Pdt.G/2021/Pta.Bdl. Serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan hak *hadhanah* anak yang belum *Mumayyiz* kepada ayah pasca perceraian dalam putusan perkara Nomor 0019/Pdt.G/2021/Pta.Bdl.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan atau di langungkan pada tempat tertentu yang menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Sumber data dalam

penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 0019/Pdt.G/2021/Pta.Bdl. Adapun sumber data sekunder, yaitu melalui riset kepustakaan dengan membaca buku, artikel, serta data yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya perceraian, *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* seharusnya diberikan kepada ibunya, namun karena ibu berhalangan untuk mendapatkan hak *hadhanah* tersebut maka dari itu hak *hadhanah* diberikan pada ayahnya. Dalam hal ini si ayah dapat membuktikan bahwa ibunya sebagai pemegang hak *hadhanah* tidak memenuhi syarat sehingga hakim memutuskan bahwa hak *hadhanah* anak tersebut jatuh kepada si ayah.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah meskipun dalam Islam yang diutamakan dalam hal *hadhanah* adalah ibu, tetapi apabila ada faktor-faktor yang menyebabkan ibu kehilangan hak *hadhanahnya*, maka hak tersebut dapat dicabut oleh pengadilan. Dalam hal ini yang diutamakan adalah kemaslahatan si anak. Dengan mengutamakan kemaslahatan, maka keselamatan sang anak yang akan diasuh dapat terjamin, baik keselamatan jasmani maupun rohani sang anak. Sebagaimana dalam Islam sendiri kemaslahatan itu dapat dilakukan dengan memelihara 5 aspek, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Sehingga hak asuh anak yang jatuh kepada ayah tetap sah dan diperbolehkan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : Putusan, Pengadilan Tinggi Agama, *Hadhanah*, Anak, *Mumayyiz*, Ayah, Perceraian.

ABSTRACT

ANALYSIS OF DECISIONS OF THE HIGH RELIGIOUS COURT (PTA) BANDAR LAMPUNG NUMBER 0019/Pdt.G/2021/Pta.Bdl CONCERNING *HADHANAH* RIGHTS OF CHILDREN WHO HAVE NOT FALLED UP TO THE FATHER POST DIVORCE

By
INTAN MALIDA RAHMA

Various problems will arise as a result of a divorce. One of them is *hadhanah* rights or child custody rights. The birth of a child as a legal event that occurs because of a husband-wife relationship, brings consequences in the form of reciprocal rights and obligations between parents and children. Children have certain rights, both rights that are the material needs of children, such as clothing, food and shelter, as well as children's immaterial rights, such as the right to worship, the right to receive attention and affection as well as the right to social interaction. One of the children's rights that are very important to be fulfilled by their parents is the right to a living (alimentation).

This case is a child custody case. In this case, the issue of child care is a girl whose custody rights fell to the plaintiff as her biological mother. When this decision was handed down the child was six years old. In the appeal decision, the judge gave custody of the child to the Appellant as the biological father of the child. Meanwhile in Article 105 of the Compilation of Islamic Law letter (a) it is stated that, in the event of a divorce, the maintenance of a child who is not yet *Mumayyiz* or not yet 12 years old is the right of the mother. Then in Article 156 letter (a) it is also stated that as a result of breaking up a marriage due to divorce, a child who has not been *Mumayyiz* has the right to receive *hadhanah* from his mother. As for the formulation of the problem in this study, what is the basis for legal considerations used by the panel of judges in deciding the case Number 0019/Pdt.G/2021/Pta.Bdl. And what is the view of Islamic law on the determination of the *hadhanah* rights of children who have not been *Mumayyiz* to the father after the divorce in the case decision Number 0019/Pdt.G/2021/Pta.Bdl. The type of research that the author uses is a type of field research, namely research conducted or carried out in a certain place using a qualitative approach method. This research was conducted at the Religious High Court of Bandar Lampung. The data source in this study is the primary data source, namely data obtained from the Decision of the Bandar Lampung High Religious Court Number 0019/Pdt.G/2021/Pta.Bdl. The secondary data sources, namely through library research by reading books, articles, and data related to the problems the authors examine. Data collection techniques through interviews and observation. In analyzing the data the author uses a qualitative descriptive method.

Based on the results of this study, it shows that with the divorce, *hadhanah* for children who have not *mumayyiz* should be given to the mother, but because the mother is unable to get the *hadhanah* rights, therefore the *hadhanah* rights are given to the father. In this case the father can prove that his mother as the holder of *hadhanah* rights does not meet the requirements so that the judge decides that the child's *hadhanah* rights fall to the father.

The conclusion of this study is that although in Islam the priority in terms of *hadhanah* is the mother, but if there are factors that cause the mother to lose her *hadhanah* rights, then that right can be revoked by the court. In this case, the priority is benefit. By prioritizing the benefit, the safety of the child to be cared for can be guaranteed, both the physical and spiritual safety of the child. As in Islam itself, this benefit can be done by maintaining 5 aspects, namely maintaining religion, preserving the soul, preserving reason, maintaining offspring and maintaining property. So that the custody of the child that falls to the father remains valid and allowed according to the applicable provisions.

Keywords: Verdict, High Court of Religion, *Hadhanah*, Children, *Mumayyiz*, Father, Divorce.